

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian. Disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Krismiaji (2015:4) :

“Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat memproses data dan transaksi guna untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan bisnis. Untuk dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh para pembuat keputusan.”

Sedangkan menurut Bastian (2010) :

“Sistem informasi keuangan daerah merupakan serangkaian mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

2.1.1.2 Indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Krisimiaji (2015:186) indikator Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Daerah adalah :

Kemanfaatan artinya Informasi yang dihasilkan oleh sistem harus membantu manajemen dan para pemakai dalam pembuatan keputusan.

1. **Praktis** artinya Sistem harus mudah digunakan.
2. **Fleksibilitas** artinya Sistem harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan sistem.

2.1.2 Internal Audit

2.1.2.1 Pengertian Internal Audit

Hiro Tugiman (2014:11) audit internal adalah *Internal Auditing* atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Sedangkan menurut Hery (2017:238) :

“Audit internal adalah suatu fungsi penelitian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penelitian yang bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen.”

Adapun Sukirno Agus (2013) dijelaskan bahwa :

“Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.”

Menurut Bastian (2014:8)

“Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian,

rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.”

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan internal audit adalah penelitian independen yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

2.1.2.2 Indikator Audit Internal

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2011:16) indikator untuk Audit Internal adalah :

1. **Independensi** artinya auditor internal yang tidak terpengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit.
2. **Kemampuan profesional** artinya tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina Rasdianto (2013:146) :

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Sedangkan menurut Baldric (2015:12) :

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.”

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pernyataan-pernyataan atau teori diatas dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi Y adalah laporan yang dapat menjelaskan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:11) yaitu :

- 1. Relevan** artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.
- 2. Andal** artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan, dan mengandung unsur manipulasi.
- 3. Dapat dibandingkan** artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.
- 4. Dapat dipahami** artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna keuangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:93) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Romney & Steinbart (2015:10) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki kontribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan.

Sedangkan menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam Ratih Purnamasari (2015) Menyatakan bahwa dengan perangkat kualitas sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, juga digunakan oleh pengguna dalam membuat keputusan.

Adapun menurut Kurniawan (2011)

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang didasarkan pada input yang baik dan output yang baik. Kedua aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.

Menurut Audiana Putri (2017) implementasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal serupa dikemukakan Irza Tawakal dan Suparno (2017) bahwa

implementasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun menurut Rukmi Juwita (2013:214) hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

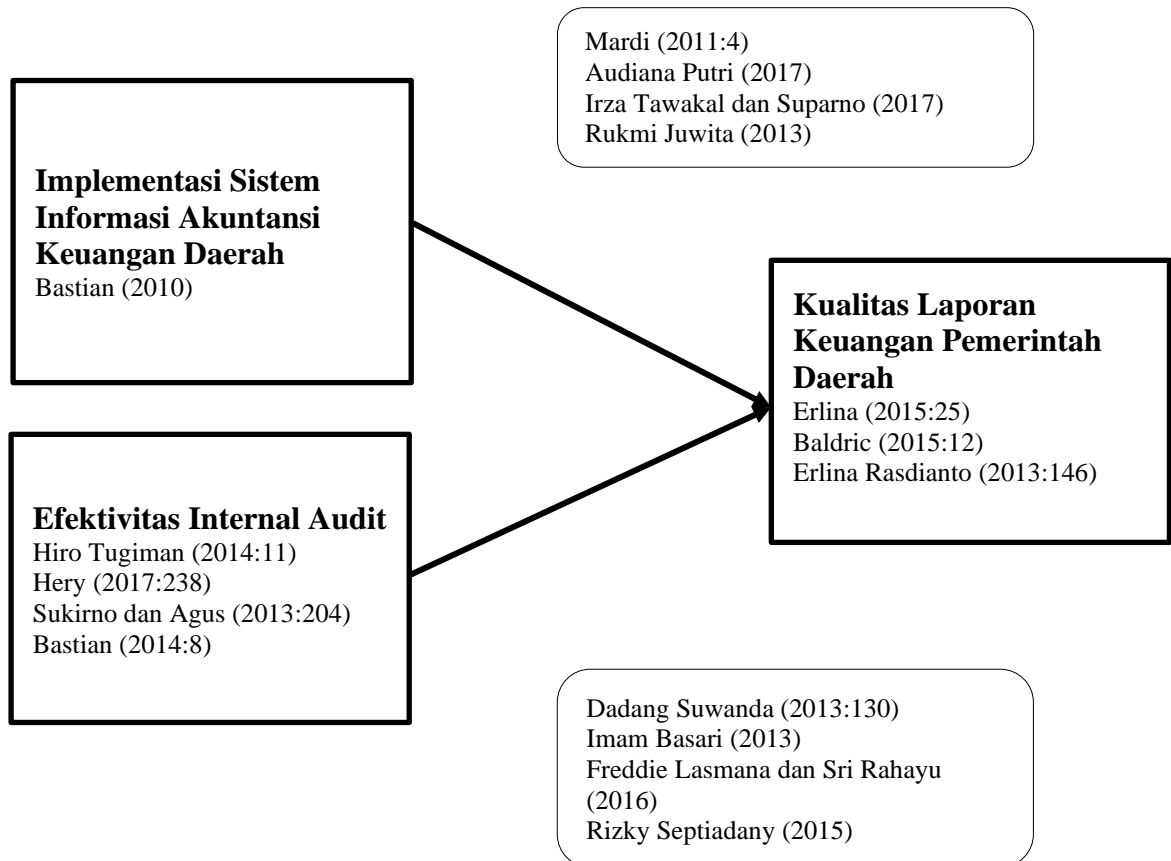
2.2.2 Pengaruh Efektivitas Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dadang Suwanda (2013:190) :

“Aktivitas audit internal berupa penjaminan kualitas (quality assurance) adalah review laporan keuangan, review dilakukan berupa pengujian untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan diberikan asersi/pendapat oleh manajemen sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.”

Sedangkan menurut Imam Basari (2013) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dapat ditingkatkan oleh peran Internal Audit

Menurut Freddie Lasmara dan Sri Rahayu (2016) peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Rizki Septidiany (2015) Pelaksanaan Audit Internal pada pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari penjelasan di atas maka paradigma pemikiran yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2014:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7) adalah asumsi atau dugaan dengan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik.

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji dan merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mencoba merumuskan kesimpulan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H₁ : Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₂ : Efektivitas Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah